

2023

LAPORAN SEMESTER II

LKjIP

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



RUTAN KELAS IIB MAMUJU

Email : rutanmamuju@gmail.com

Website : rutanmamuju.kemenkumham.go.id

Kode Pos : 91511

Telp : (0426) 21533-21532

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami senantiasa dihaturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan karuniaNya atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju Tahun Anggaran 2023 dan dapat menjadi pertanggung jawaban kepada masyarakat atas penggunaan APBN yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat periode Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju Tahun Selama Tahun 2023 merupakan laporan atas pencapaian target sasaran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disusun dan ditanda tangani pada awal Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini dengan mempedomani kebijakan umum yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM RI, maupun oleh Kementerian terkait sebagai penyajian laporan atas capaian Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju. Berikut penjabaran tujuan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju Tahun Anggaran 2023:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;
2. Sebagai pemberian informasi kepada masyarakat atas pencapaian maupun kegagalan dari target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemangku Program pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju atas keberhasilan dalam pencapaian Kinerja yang memberikan kontribusi positif dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju Tahun 2023.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju Tahun 2023 ini disusun. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini dapat menyajikan informasi yang terukur dan akurat kepada pemberi mandat secara khusus maupun kepada masyarakat secara umum, dan juga dapat dijadikan tolok ukur dalam pencapaian kinerja pada periode Tahun Anggaran berikutnya.

Mamuju, 04 Januari 2024

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Novian Endus Santoso

NIP. Nip.19751107 199703 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat merupakan implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu Laporan Kinerja instansi Pemerintah juga merupakan gambaran dari pencapaian Rencana Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sasaran kerja Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2023 tertuang kedalam Perjanjian Kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Untuk mendorong tewujudnya percepatan pembangunan, sumber daya manusia yang handal, implementasi Reformasi Birokrasi dan penggunaan APBN yang tepat sasaran, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju mengambil arah kebijakan strategis pada setiap sub seksi, yaitu:

1. Sub Seksi Pengelolaan
 - a. Peningkatan dan Pemenuhan Pengelolaan administratif dan fasilitatif Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju.
 - b. Optimalisasi dan Peningkatan kualitas SDM Rutan.
2. Sub Seksi Pelayanan Tahanan
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan hak integrasi kepada Narapidana/Tahanan.
 - b. Optimalisasi Pembinaan Kepribadian berbasis intelektual terhadap Narapidana/Tahanan.
 - c. Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian.
 - d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Narapidana/Tahanan dan Peningkatan Kualitas Mutu Pengolahan Bahan Makan bagi Narapidana/Tahanan.
3. Kesatuan Pengamanan Rutan
 - a. Peningkatan Stabilitas Keamanan pada Rutan.
 - b. Pengoptimalan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

- c. Optimalisasi peran SATOPSPATNAL dalam mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang pada tugas dan fungsi organisasi Rutan .

Pelaksanaan Tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 (Renstra 2020 – 2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan 4 Sasaran Kinerja dengan 20 Indikator Kinerja Kegiatan serta untuk setiap indikatornya disertai dengan target capaian untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja dimaksud.

Untuk mencapai kinerja yang lebih baik sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan Pembinaan Narapidana dan Perawatan Tahanan;
2. Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban;
3. Melakukan Penatausahaan/Pengelolaan pada urusan kepegawaian, Keuangan dan BMN.

Sepanjang Tahun 2023 periode Januari s/d Desember 2023 Rutan Mamuju telah menyelenggarakan dan melaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai target-target yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja. Pada Tahun 2023, total Pagu anggaran yang diperoleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju sebesar Rp.6.970.490.000. Pelaksanaan kegiatan Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju ditunjang dengan DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Nomor : SP DIPA- 013.05.2.407298/2023, dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

No.	Nama Program	Pagu	Realisasi	%
1	Program BF.5252 Tentang Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2,806,262,000	Rp. 2,806,162,000	100.00%
2	Program WA.6231 Tentang Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4,164,228,000	Rp. 4,158,487,589	99.86 %

	Jumlah	6.970.490.000	Rp. 6,964,649,589	99.92 %
--	---------------	----------------------	--------------------------	----------------

Terdapat beberapa optimalisasi dalam rangka mengoptimalkan capaian penyerapan Anggaran guna yaitu :

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Ringkasan Eksekutif.....	3
Daftar Isi.....	4
BAB. I	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	10
C. Maksud dan Tujuan.....	12
D. Aspek Strategis.....	15
E. Isu Strategis.....	16
F. Sistematika Laporan.....	18
BAB. II (PERENCANAAN KINERJA)	11
A. Uraian Singkat Rencana Strategis.....	11
B. Target Kinerja	14
C. Penetapan Kinerja.....	16
BAB. III (AKUNTABILITAS KINERJA)	17
A. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	21
B. Kinerja Lainnya Tahun 2023.....	30
C. Akuntabilitas Keuangan.....	40
BAB.IV (PENUTUP)	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran Dan Langkah-Langkah Ke Depan.....	50
Lampiran-Lampiran.....	51

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi merupakan bentuk pertanggung jawaban Pengguna Anggaran kepada pemberi mandat dan kepada masyarakat sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut dipedomani berdasarkan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM mengacu kepada Peraturan Perundang - undangan dan Peraturan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang mengatur dan merencanakan program kerja dan pembangunan, baik untuk jangka panjang yang disebut dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) , jangka menengah atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan jangka pendek disebut dengan Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah salah satu institusi Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Sebagai unsur pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM berperan serta dalam melaksanakan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan HAM serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai implementasi

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKJIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023.

LKJIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju tahun 2023 disusun berdasarkan data dan laporan dari setiap Sub seksi. LKJIP tersebut memuat tentang penetapan kerja tahunan yang ditetapkan pada awal tahun 2023, pelaksanaan rencana kerja sepanjang tahun 2023 dan penilaian/pengukuran kinerja di akhir tahun anggaran 2023.

Setelah penyusunan LKJIP ini diharapkan nantinya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju dapat mengetahui seberapa jauh keberhasilan yang dicapai dari rencana kerja dan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga dapat diketahui permasalahan, kendala dan hambatan – hambatan yang merintanginya tercapainya keberhasilan kinerja dan menjadi suatu pemikiran dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya di tahun – tahun yang akan datang.

Dengan kata lain, LKJIP ini disampaikan sebagai wujud pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 yang juga telah menggunakan anggaran Negara dan memenuhi unsur transparansi mengingat masyarakat saat ini sangat proaktif mengamati dan mengkritisi kinerja pemerintah yang disebut sebagai pemegang roda pembangunan nasional.

Sesuai dengan Keputusan Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan pelaporan Kinerja adalah

- a) Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai kepada pemberi mandat secara khusus dan kepada masyarakat secara umum
- b) Sebagai informasi kepada pemberi mandat dan masyarakat atas keberhasilan atau kegagalan dari target kinerja yang telah ditetapkan
- c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penggunaan Anggaran tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun sebagai bentuk realisasi dari instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga.

Rutan Kelas IIB Mamuju sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang dibawah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, berkewajiban pula menyusun LKJIP secara periodik sebagai bentuk partisipasi wajib dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1) Tugas

Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan tiap bidang adalah di uraikan satu per satu dalam tabel berikut ini:

No.	Bidang Pelaksana	Tugas
1.	Subsi Pelayanan Tahanan	Melakukan pengadministrasian dan perawatan, pembinaan kemandirian, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
2.	Subsi Pengelolaan	Melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, urusan surat menyurat, dan kearsipan di lingkungan rutan.
3.	Kesatuan Pengamanan Rutan	Memelihara keamanan dan ketertiban Rutan

2) Fungsi

- Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka / terdakwa.
- Melakukan pemeliharaan dan ketertiban Rutan.
- Melakukan pengelolaan Rutan
- Melakukan urusan tata usaha Rutan.

3) Struktur Organisasi

Penyusunan ini merupakan bentuk peningkatan akuntabilitas dan perwujudan nyata visi dan misi yang telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Rutan Mamuju telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut juga telah mengatur susunan organisasi Rutan, yang mana di dalamnya terdapat bidang-bidang kerja yang menyusun struktur internal Rutan. Bidang-bidang tersebut terdiri atas:

1. Subseksi Pelayanan Tahanan;
2. Subseksi Pengelolaan Rutan;
3. Kesatuan Pengamanan Rutan; dan

Implementasi di Rutan Mamuju, menggabungkan Subseksi Pengelolaan dan Petugas Tata Usaha, yang disebabkan karena kurangnya SDM yang ada. Ketiga bidang itu kemudian berjalan dengan tugasnya masing-masing.

Sebuah Rumah Tahanan dipimpin oleh seorang Kepala, sesuai Keputusan Menteri. Kepala Rutan inilah yang menjadi tonggak organisasi Rutan dan membawahi bidang-bidang pelaksanaannya. Di Rutan Mamuju, Kepala Rutan memegang peran pembina utama. Baik itu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas Rutan. Pembinaan-pembinaan formal itu dilakukan secara periodik tiap bulan.

Sebagai gambaran struktur organisasi Rutan, berikut ini disajikan skema lengkap susunan organisasi yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju.



STRUKTUR ORGANISASI RUTAN KELAS IIB MAMUJU



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 pada Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju adalah :

1. Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan/kinerja pada Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju;
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju secara khusus dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia secara umum;
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju;
4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju secara berkesinambungan.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya;

D. ASPEK STRATEGIS

1) Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju bertanggung jawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk layanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan Layanan kunjungan secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang pemasyarakatan secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

2) Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju, mengimplementasikan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum dan hak asasi manusia kepada seluruh jajaran pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan juga memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta

menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju.

3) Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

4) Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Membangun kesadaran hukum Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan tugas bersama yang harus terus dilakukan. Upaya membangun kesadaran hukum tersebut salah satunya dilakukan melalui Sosialisasi dan

internalisasi oleh pimpinan kepada pegawai dan mengoptimalkan peran penyuluh hukum dalam melakukan penyuluhan Hukum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lepas Kelas III Mamasa. Penyuluh hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum..

5) Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran masyarakat

Sebagai Satuan kerja Masyarakat, Rumah Tahanan Kelas IIB Mamujuturut menjaga stabilitas keamanan dengan menjaga kondisi Lapas/Rutan tetap dalam keadaan yang kondusif, tertib dan aman. Selain itu, Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju juga menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan ekonomi nasional. Proses ini dilaksanakan melalui Program Revitalisasi Masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan

E. ISU STRATEGIS

Meskipun dalam keadaan pandemik yang membatasi pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tahun 2023 serta adanya beberapa bencana gempa bumi di pertengahan tahun 2023 Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju tetap menunjukkan komitmen dalam mencapai keberhasilan dalam pencapaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2023.

Pada prinsipnya Lingkungan Strategik yang berpengaruh khususnya di Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju dapat dibagi atas 2 (dua) Faktor strategik, yaitu :

1. Faktor Strategis Internal

Sesuai dengan situasi dan kondisi Rutan Kelas IIB Mamuju dapat dikemukakan beberapa faktor Strategik Internal yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi, antara lain :

- a. Kondisi SDM Rutan Kelas IIB Mamuju secara kualitas diperlukan peningkatan melalui Sistem Pendidikan dan Pelatihan bertahap (implementasi dan penerapan CorpU).
- b. Kondisi Organisasi dan sistem manajemen SDM termasuk mekanisme rekrutmen dan alokasi pegawai pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis yang masih kurang sehingga dituntut untuk rangkap tugas dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap satker. Untuk jelasnya, berikut ini disajikan data SDM Rutan Kelas IIB Mamuju dari golongan, jenis kelamin, dan pendidikan.

2. Faktor Strategik Eksternal

Sesuai dengan situasi dan kondisi Sulawesi Barat dapat dikemukakan beberapa faktor strategik eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rutan Kelas IIB Mamuju, antara lain :

- a. Mekanisme koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga-lembaga sosial, diperlukan adanya kesepakatan / MOU yang lebih terpadu di tingkat pusat kemudian dilakukan penguatan di tingkat daerah
- b. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rutan, masih terbatas peran serta dan partisipasi masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan pola pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan hukum di daerah melalui mekanisme lokakarya, seminar, diseminasi dan sosialisasi di Wilayah Sulawesi Barat.
- c. Kebijakan prioritas alokasi dana / anggaran untuk Kementerian Hukum dan HAM yang sesuai dengan kinerja serta sistem anggaran berbasis kinerja yang dapat menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
- d. Kebijaksanaan Anggaran secara memadai baik pada Kantor Wilayah maupun pada Unit Pelaksana Teknis, sehingga dapat menunjang dalam peningkatan kinerja dengan berbasis anggaran.
- e. Dikarenakan adanya pandemi Covid-19, Rutan Kelas IIB Mamuju tetap melaksanakan tugas dan fungsi guna pencapaian tujuan organisasi, dengan memperketat protokol kesehatan.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju selama tahun 2023. Capaian kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan melalui analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang diharapkan dapat memaksimalkan identifikasi pada sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju pada tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekreatris Utama BPKP Nomor Se-17/SU/01/2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2023. Sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas uraian tugas dan fungsi, struktur organisasdan sumber daya manusia, serta aspek-aspek/isu-isu strategis di Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju yang menjadi perhatian.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja pada tahun 2023.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju selama tahun 2023 sebagai hasil implementasi dari keseluruhan kegiatan dalam periode tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Menjelaskan simpulan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju pada tahun 2023 dan menguraikan langkah-langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai arahan RPJPN 2005 – 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan tahapan dalam RPJPN 2005 – 2025, maka RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan ke empat (terakhir). Terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005 – 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan Nasional periode akhir, yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020 – 2024 adalah “Indonesia Yang Berpenghasilan Menengah Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
 4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
- Sebagai bagian dari Pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dima

knai sebagai Tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan Hukum dan Hak Asasi Manusia ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan – kegiatan pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di lakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan Lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020 – 2024. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 merupakan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis disusun untuk menghadapi persoalan yang mungkin timbul dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Rencana strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif *Stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learning dan Growth* serta *Financial* sehingga dapat mengarahkan anggota / organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya.

1. Visi, Misi dan Tujuan Organisasi

VISI : Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus

memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020 – 2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 – 2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Adapun 5 (lima) arahan utama yang di tetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah :

- a. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di dukung dengan Kerjasama industri dan talenta global;
- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang – Undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
- d. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi;
- e. Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari Pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 –2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepala Presiden dan Wakil Presiden Untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI : Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden point (f) yaitu Penegakan Sistem Hukum yang bebas dari korupsi bermartabat dan terpercaya, misi point (g) yaitu Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi point (h) yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

- 1) Membentuk Peraturan Perundang – Undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- 3) Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasarakatan yang bebas dari Korupsi, bermanfaat dan terpercaya;
- 4) Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
- 5) Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 6) Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
- 7) Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Tujuan Organisasi :

Dalam penyusunan Rencana Strategis, tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan, maka tujuan yang akan di capai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2020 – 2024 adalah :

- a. Mewujudkan Peraturan Perundang – Undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah;
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat;
- d. Terlindunginya Hak Asasi Manusia;
- e. Meningkatkan nilai – nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- f. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNI/WNI

yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;

- g. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Sasaran Strategis dan Tata Nilai

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome / impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Level Perspektif Organisasi	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Perspektif Pemangku Kepentingan Eksternal	Terpenuhinya Peraturan Perundang - Undangan yang sesuai dengan azas pembentukan Peraturan Perundang - Undangan	Indeks Kualitas Perundang - Undangan
Perspektif Bisnis Proses Internal	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target Persentase Capaian aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi target
	Memastikan pelayanan publik di Bidang Hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

	pelayanan publik	
	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi Nasional	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah di tindaklanjuti
		Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Kekayaan Intelektual secara tuntas
		Persentase menurunnya residivis
		Persentase Klien Pemasarakatan yang produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna
		Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjada kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
		Persentase Tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
		Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan
		Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum
		Persentase desa / kelurahan sadar hukum

		yang terbentuk di masing - masing wilayah
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
		Indeks Kepuasan layanan bantuan hukum
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
		Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi
		Nilai SAKIP
		Nilai Maturitas SPIP
		Opini Atas Laporan Keuangan
		Indeks Persepsi Integritas
		Persentase KTI yang disitasi

**Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM
Tahun 2020 – 2024**

Jika digambarkan kedalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, Maka Akan terlihat sebagai berikut:



Guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Berikut Nilai-Nilai yang terkandung dalam setiap kata dari Tata Nilai **PASTI** :

➤ **Profesional**

“Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penugasan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi”

➤ **Akuntabel**

“Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau

peraturan yang berlaku”

➤ **Sinergi**

“Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan Kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas”

➤ **Transparan**

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapai”.

➤ **Inovatif**

“Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya”.

A. Penetapan Kinerja

Berdasarkan target Kinerja tersebut, Rutan Kelas IIB Mamuju telah menetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan sasaran yang diharapkan. Rutan Kelas IIB Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mengacu kepada arah kebijakan Menteri Hukum dan HAM R.I sebagai wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi, demikian tabel Target Kinerja yang telah ditetapkan :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Mamuju ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Sulawesi Barat yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun 2023. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rutan wajib melaksanakan seluruh kebijakan Menteri Hukum dan HAM selaku perpanjangan tangan di Daerah. Sebagai pelaksana kebijakan di daerah, Rutan Kelas IIB Mamuju dalam mendukung program dan pelaksanaan anggaran melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja yang mengacu kepada pelaksanaan kegiatan dan pencapaian hasil (outcome).

A. Capaian Kinerja Organisasi

Rutan Kelas IIB Mamuju dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada kebijakan Pemerintah pusat. Pencapaian sasaran kinerja sesuai program kerja dilaksanakan atas dasar penyusunan program dan rencana kinerja yang disusun sebelum pelaksanaan tugas Tahun Anggaran. Demikian tabel capaian kinerja di uraikan beserta instrument nya :

1. Meningkatnya Pelayanan Tahanan

- Penetapan Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
01.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%

- Target Kinerja

No	Kegiatan	OUTPUT	Anggaran
1	Fasililitas dan Pembinaan Masyarakat	99,84 %	2,661,467,963

- Target dan Realisasasi

Tabel 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	50%	71.42%

Berdasarkan amanah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tentang terkait tahanan yang tidak memiliki dasar penahanan harus di dikeluarkan terkait perintah tersebut Rutan Kelas IIB Mamuju telah mengeluarkan semua WBP yang tidak memiliki dasar penahanan. Dari data di atas menunjukkan persentase Tahanan yang Overstaying Telah Menurun utamanya Tahanan AI, AII dan AIII namun untuk Tahanan AIV dan AV belum terlalu maksimal karena sering terlambat dalam menirirkan Penetapan Tahanan Maupun Putusan.

Jenis Registrasi	Jml. WBP Overstaying Sudah Verifikasi	Jml. WBP Overstaying Belum Verifikasi
A.III	1	0
A.V	3	1
A.IV	2	0
A.III	14	3
A.II	0	4
A.I	0	1

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{50\%}{70\%} \times 100\% = 71.42$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
persentase menurunnya tahanan yang overstaying	50 %	70%	50%	50%	50%	71.42

Tabel 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	70%	100%	142,85%

Demi pemenuhan hak-hak WBP di anggap perlu melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum Rutan Kelas IIB Mamuju dalam tugas dan fungsinya telah melaksanakan kegiatan tersebut dan terus mengupayakan seluruh WBP mendapatkan Hak-hak nya dan telah dilaksanakan Penyuluhan Hukum pada Rutan Kelas IIB Mamuju oleh Kantor Wilayah dan di peruntukkan kepada seluruh WBP Rutan Kelas IIB Mamuju.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{100 \%}{70\%} \times 100\% = 142,85$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	75 %	75%	75%	100%	123.24	142.85

Tabel 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	70%	100%

Telah dilaksanakan Penyuluhan Hukum pada Rutan Kelas IIB Mamuju oleh Kantor Wilayah, sehingga seluruh Tahanan yang ada di Rutan Kelas IIB Mamuju telah mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{70\%}{70\%} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	70%	80%	100	100

2. Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup

Berisi tentang analisa capaian kinerja UPT Pemasarakatan atas pelaksanaan pelayanan pembinaan kemandirian dan kepribadian (terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta sistem, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) pada bidang pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan yang menjadi tanggung jawab pada UPT Pemasarakatan”.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud, Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

Tabel 1

Capaian Perentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/Narapidana/Anak yang sesuai standar di Rutan Kelas IIB Mamuju di dorong dengan adanya kerja sama bersama dengan dinas kesehatan Kab. Mamuju

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{75\%} \times 100\% = 133,33\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Perentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/Narapidana/Anak yang sesuai standar	70 %	75%	90%	100%	128.57	133,33

Tabel 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan(preventif) secara berkualitas	93%	100 %	107,53 %

Capaian Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas di Rutan Kelas IIB Mamuju di optimalkan dengan adanya kerja sama bersama dengan puskesmas setempat yaitu puskesmas Binanga.

No	Tenaga Kesehatan	2018		2019		2020		2022		2023	
		Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu
1	Dokter Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Dokter Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perawat	0	4	0	4	0	3	3	0	4	0
4	Psikolog/ Psikiater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Apoteker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bidan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ahli Gizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel diatas menyatakan bahwa pada semester II Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Mamuju memiliki 4 (empat) orang perawat. Yang bertugas memberikan pelayanan Kesehatan kepada tahanan dan narapidana. Rutan Kelas IIB Mamuju belum memiliki dokter hal ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Rutan Kelas IIB Mamuju.

Tabel 8

Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Rutan

No	Jenis Penyakit	Tahun	
		2022	2023
1	Hepatitis	0	1
2	IMS	0	0
3	TBC	1	2
4	HIV	1	0
5	Jantung	0	2
6	Kanker	0	0
7	Pencernaan	50	71
8	Lain-lain	250	373
Jumlah		303	449

Tabel diatas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Rutan Kelas IIB Mamuju. Pada tahun 2023 yang menderita penyakit Hepatitis sebanyak 1 orang, TBC 2 org, jantung 2 orang, pencernaan 71 orang, jumlah narapidana yang menderita penyakit lain-lain berjumlah 92 orang. Sebagian besar penyakit tersebut diderita oleh narapidana sebelum masuk kedalam rutan. Sebagian kecil setelah masuk dikarenakan adanya penularan dari penghuni lain mengingat tingkat *overcrowded* di Rutan Kelas IIB Mamuju hampir 15 %. Sebagai upaya untuk mengurangi penularan tenaga kesehatan Rutan Kelas IIB Mamuju melakukan pembenahan yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan serta menjaga sirkulasi udara yang bersih dan sehat. Selain itu, tindakan pengobatan yang dilakukan adalah pemberian obat dan vitamin.

Tabel 9.

Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Sebab Kematian	2019		2020		2021		2022		2023	
	NAP	TAH	NAP	TAH	NAP	TAH	NAP	TAH	NAP	TAH
HIV/AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pernafasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pencernaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginjal dan Saluran Kemih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Susunan Syaraf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jantung dan pembuluh darah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Diabetes Melitus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuh diri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perkelahian/Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas, angka kematian narapidana di Rutan Kelas IIB Mamuju terdapat 1 orang Narapidana yang meninggal akibat Jantung dan pembuluh darah pada tahun 2023.

Tabel 10.

Angka rawat inap Lapas/Rutan

No	Rawat	Narapidana	Tahanan
1	Inap Dalam	3	0
2	Inap Luar	4	2
3	Jalan Luar	7	0

Berdasarkan tabel di atas menyebutkan bahwa narapidana atau tahanan Rutan Kelas IIB Mamuju yang mendapatkan perawatan medis pada tahun 2023 7 orang. Narapidana dan tahanan yang menjalani rawat jalan luar disebabkan tidak adanya tenaga dokter, untuk menangani penyakit yang diderita dan melakukan rawat inap. Selain itu, belum tersedianya sarana prasarana penanganan penyakit tersebut contohnya narapidana yang mengalami penyakit serius yang kondisi harus di periksa oleh dokter ahli menggunakan sarana dan prasarana yang dilengkapi alat dan ruangan steril akan tetapi belum terdapat pada Rutan Kelas IIB Mamuju untuk mengurangi resiko adanya kematian pada Rutan

Tabel 11.

Data Penderita Penyakit Menular di Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	Jumlah	
		2022	2023
1	HIV/Aids	0	0
2	TBC	1	2
3	Hepatitis	0	1
4	Penyakit Kulit	0	0
5	Penyakit Mata	0	1
Total		1	4

Tabel di atas menyebutkan bahwa pada tahun 2023 narapidana yang menderita penyakit menular sebanyak 4 orang.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{92\%} \times 100\% = 108.69$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan(preventif) secara berkualitas	90 %	92%	90%	100%	111.11%	108.69

Tabel 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTA SE
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal	96%	96%	100%

Mengingat selama 1 tahun Rutan Kelas IIB Mamuju tidak merawat wanita hamil maka Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal Rutan Kelas IIB Mamuju di anggap mencapai 100%

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{96\%} \times 100\% = 100 \%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal	95 %	96%	95%	96%	100	100

Tabel 4

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Persentase Narapidana/tahanan/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	70%	100%

Persentase Narapidana/tahanan/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani di Rutan Kelas IIB Mamuju di anggap mencapai 100% karena tidak ada wbp dengan kecenderungan tersebut.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	95%	96%	100%	100%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	133.33%

Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di penuhi dengan dengan di adakannya kebutuhan untuk kolompok rentan . Tahanan/Narapidana Lansia pada Rutan Kelas IIB Mamuju diberi akses ke poliklinik Rutan untuk memeriksakan Kesehatannya, dan apabila tidak mampu berkunjung maka Perawat yang datang Ke kamar Hunian

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{75\%} \times 100\% = 133.33\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehata sesuai standar	75 %	75%	95%	100%	105.26%	133,33%



INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan standar	80%	80%	100%

Rutan Kelas IIB Mamuju Menyiapkan Sarana Prasarana guna manjamin Kebutuhan Tahanan/Narapidana Anak yang berkebutuhan Khusus mendapatkan Hak Sama. Rutan Kelas IIB Mamuju selama 2023 memiliki 1 WBP berkebutuhan Khusus.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{80\%}{80\%} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan standar	75 %	80%	75%	80%	100%	100%

Tabel 7

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	70%	70%	100%

Dari data dari bagian subseksi pelayanan tahanan bahwa selama tahun 2023 hanya terdapat 2 org WBP yang terinfeksi penyat TBC sedangkan HIV AIDS tidak ada. Tercatat 2 orang WBP yang mengalami penyaki TBC berhasil di sembuhkan sehingga Persentase



keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh) di nyatakan 100% atas kerjasama dengan dinas kesehatan dan melakukan kontrol serta menempatkan WBP tersebut berada di Ruang Isolasi demi menjaga terjadinya penularan ke WBP lain. Selain hal tersebut dilakukan juga langkah-langkah pencegahan yakni dengan melaksanakan sosialisasi HIV dan TBC.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{70\%} \times 70\% = 100\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan standar	60 %	80%	100%	100%	166%	166%

Tabel 8

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkoba	23%	23 %	100%

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkoba tolak ukurnya adalah bahwa tidak adanya percobaan penyelundupan obat-obatan terlarang di Rutan Kelas IIB Mamuju. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkoba hanya mengacu pada pengamatan harian WBP dan kesehatan WBP.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{23\%}{23\%} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkoba	23 %	25%	23%	25%	100%	100%

3. Meningkatnya kualitas penyelenggara permasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

Pada poin ini Berisi tentang analisa capaian kinerja UPT Pemasyarakatan atas pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban (terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta sistem, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada bidang pelayanan keamanan dan ketertiban yang menjadi tanggung jawab pada UPT Pemasyarakatan.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
03.	Meningkatnya kualitas penyelenggara permasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%
		persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%

Target Kinerja

Kegiatan	OUTPUT	Anggaran
Operasi Bidang Keamanan		74,430,000

Tabel 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	80%	100%

Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar capaian tersebut di laksanakan dengan berbagai cara. Yakni membuat banner layanan pengaduan baik ke UPT masyarakat, tingkat kanwil dan kementerian RI.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{80\%}{80\%} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	75%	80%	100%	100%

Tabel 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	700%	100%

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, UnitPelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis gangguan kamtib	Jumlah				
	2018	2019	2020	2022	2023
Pelarian	0	0	0	1	0
Penyelundupan narkoba	0	0	0	0	0
Perkelahian	0	0	0	0	0
Penganiayaan/ Kekerasan	0	0	0	0	0
Kerusuhan	0	0	1	0	0
Pemberontakan	0	0	0	0	0
Lain-lain	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	1	1	0

Tabel diatas menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2018-2023, Rutan Kelas IIB Mamuju terjadi 1 (satu) gangguan keamanan dan ketertiban yaitu pelarian 2021 pasca gempa. Selanjutnya di tahun 2023 tidak ada gangguan kamtib ini menunjukkan presentase capaian 100% dalam rangka gangguan kamtib yang dapat dicegah.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 142.86\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	50%	100%	83%	142,86%

Tabel 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%

persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib. Indikator tersebut di lihat dengan tidak adanya perkelahian antar WBP , tertib dalam pelaksanaan kegiatan kemandirian serta aktif mengikuti kegiatan kepribadian.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	75%	75%	75%	100%	75%	133,33%



Tabel 4

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	75%	110%

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas terlaksana secara maksimal dengan indikator bahwa di Rutan Kelas IIB Mamuju dengan tingkat ketertiban WBP terhadap tata tertib yang terbilang baik. dan selama 2022 tidak ada gangguan kamtib apaun yang terjadi di Rutan Kelas IIB Mamuju.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{60\%} \times 100\% = 166.66\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	75%	70%	75%	70%	75%	100%

4. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Terusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan

	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
	Nilai IKPA	100
	Nilai SMART	100

Target Kinerja

Kegiatan	OUTPUT	Anggaran
Layanan Perkantoran	1 Layanan	2.489.361.000
Layanan Perencanaan Internal	2 Layanan	9.840.000
Layanan Umum	1 Layanan	23.440.000
Layanan Organisasi dan tata kelola internal	1 Layanan	5.830.000
Layanan kehumasan dan Keprotokoler	1 Layanan	2.475.000
Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT	1 Laporan	3.415.000

Tabel 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100 %

Capaian layanan perkantoran tercapai 1 Layanan dengan terselesaikan pembayaran gaji dan tunjangan serta pemenuhan layanan operasional layanan perkantoran

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{1 \text{ Layanan}_r}{1 \text{ Layanan}_t} \times 100\% = 100\%$$

1 Layanan

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Layanan Perkantoran	1	1	1	1	100%	100%

Tabel 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Layanan Perencanaan Internal	1 layanan	2 layanan	200 %

Layanan Perencanaan Internal tercapai 2 Layanan dengan indikator terselesaikannya Pagu indikatif hingga terbitnya pagu anggaran dan DIPA tahun 2023 serta tercapainya sistem pengelolaan keuangan dan perbendaharaan yang lebih baik.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{2 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 200\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1	1	1	2	100%	200%

Tabel 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 layanan	1 layanan	100

Terusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan 1 layanan indikator dengan terlaksana tata kelola Rutan Kelas IIB Mamuju sebagai pendukung Menejemen Rutan Kelas IIB Mamuju.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Terusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1	1	1	1	100%	100%

Tabel 4

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemyarkatan	1 layanan	0 layanan	0 %

Tidak terpenuhi layanan tersebut di sebabkan karena tidak terdapat dalam anggaran tahun 2023

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{0}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 0\%$$



Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Layanan Organisasi dan tata kelola internal	0	0	0	0	0	0

Tabel 5

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu analisis indikator adalah dengan terselesaikannya Laporan Kinerja instansi Pemerintah tahun 2023 tepat waktu dan akuntabel.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{1 \text{ Layanar}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1	1	1	1	100 %	100%

Tabel 6

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Nilai IKPA	100 %	99.79 %	99.79 %

Nilai IKPA tidak tercapai 100 % di sebabkan oleh Hal III DIPA (99.79 %).

The screenshot shows the MONEVPA system interface. The main heading is 'Indikator Pelaksanaan Anggaran'. A filter is set to 'SAMPAI DENGAN | DESEMBER'. The table below displays the following data:

NO	KODE KPPN	KODE DA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	SELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	178	013	407298	RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.93	100.00	100.00	99.79	100%	99.79
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	9.79	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		99.59					100.00			

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

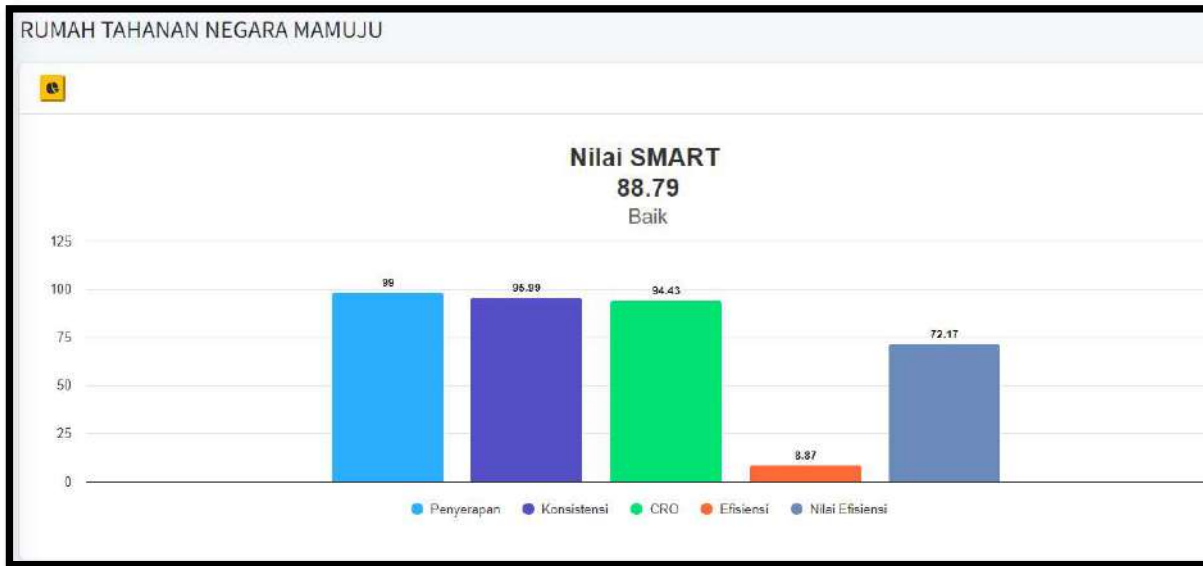
$$\frac{99.79\%}{100\%} \times 100\% = 99.79\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Nilai IKPA	100%	100%	75%	95.12%	75%	99.79%

Tabel 7

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Nilai Smart	100 %	88.79 %	88.79 %



Nilai Smart tidak tercapai 100 di sebabkan karena penyerapan anggaran yang tidak terealisasi 100 %, begitupun konsistensi dan efisiensi yang tidak mencapai 100% yang di sebabkan penggunaan anggaran yang di sesuaikan dengan kondisi,situasi dan kebutuhan .

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{88.79\%}{100\%} \times 100\% = 88.79\%$$

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Nilai SMART	75%	75%	75%	98.30%	100%	88.79%

B) REALISASI ANGGARAN

Berisi tentang alokasi dan realisasi anggaran Rutan Kelas IIB Mamuju pada tahun berjalan Per- 31 Desember 2023

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
5252.BD C.001	Layanan Tahanan	78,978,000	78, 978,000	0	100 %
5252.BD C.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	2.652.854.000	2.652.754.000	100,000	100 %
5252.BH B.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	74,430,000	74,430,000	0	100 %
6231.EA A.994	Layanan Perkantoran	4,029,228,000	4,023,996,589	5,231,411	99.87 %
6231.EA B.001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10,000,000	10,000,000	0	100 %
6231.EA B.002	Manajemen Keuangan UPT	20,000,000	20,000,000	0	100 %
6231.EB A.962	Layanan Umum	44,798,000	44,289,000	509,000	98.86 %
6231.EB C.954	Layanan SDM	20,100,000	20,100,000	0	100 %
6231.EA C.001	Manajemen BMN UPT	10,000,000	10,000,000	0	100 %
6231.EA H.001	Reformasi Birokrasi UPT	10,102,000	10,102,000	0	100 %
6231.EAI .001	Hubungan Masyarakat UPT	15,000,000	15,000,000	0	100 %

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
6231.EA L.001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan	5,000,000	5,000,000	0	100 %
JUMLAH		6.970.490.000	6.964.649.589	5.840.411	99.92%.

Pada tabel atas menunjukkan bahwa DIPA Rutan Kelas IIB Mamuju sebesar **6.970.490.000** dan di tunjukkan pada tabel tersebut telah realisasi sebesar **6.964.649.589** pada tahun berjalan Per- 31 Desember 2023, hal tersebut menyebabkan sisa pagu sebesar **5.840.411** maka **presentase realisasi / tanggal tersebut adalah 99.92%.**

BAB IV PENUTUP

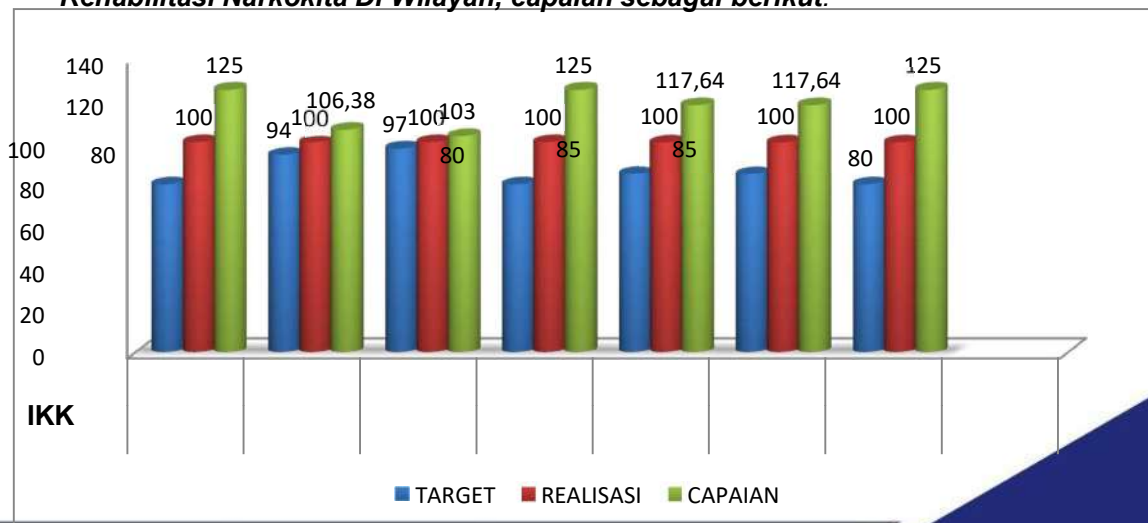
A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rutan Kelas IIB Mamuju telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada semester II tahun 2023. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kurun waktu Januari-Juni 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2017-2023 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2017-2023. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Evaluasi kinerja program kegiatan UPT Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 dengan rincian program dan kegiatan Rutan Kelas IIB Mamuju. Adapun hasil kinerja yang telah dicapai berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran, sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah, capaian sebagai berikut:**



Ket. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- 1.1 Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar
- 1.2 Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
- 1.3 Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
- 1.4 Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
- 1.5 Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 1.6 Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 1.7 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

2. Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar



Ket. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- 1.1 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
- 1.2 Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Hukum
- 1.3 Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar



Ket. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- 1.1 Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai standar
- 1.2 Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
- 1.3 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
- 1.4 Persentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

4. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen

Berdasarkan pelaksanaan kinerja terhadap sasaran kegiatan Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, capaian yang diperoleh untuk setiap Indikator Kinerja secara umum telah terpenuhi diantaranya:

- 1.1 Tersusunnya Dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu dengan hasil tercapai 100%
- 1.2 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan pada periode 2023
- 1.3 Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat dengan hasil seluruh pegawai telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi baik melalui diklat, Seminar, maupun Workshop sesuai dengan jabatan masing-masing pegawai
- 1.4 Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Anggaran dan Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu dengan hasil sebagian besar telah tercapai
- 1.5 Terlaksananya Layanan Perkantoran yang dilaksanakan oleh masing-masing sub seksi.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rutan Mamuju adalah sebagai berikut :

1. Terkait dengan capaian kinerja pada indikator kinerja terdapat beberapa indikator yang tidak memenuhi target diantaranya realisasi anggaran sebesar 99,79% dikarenakan adanya kelebihan belanja pegawai dan belanja bahan makanan.
2. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Rutan Mamuju.
3. Minimnya tempat atau ruang pembinaan sehingga membuat program pembinaan kurang maksimal.

Dalam pencapaian target kinerja periode Januari s/d Desember Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Mamuju tidak lepas dari kerjasama, peran serta sinkronisasi kerja seluruhpihak seperti instansi lain yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Rutan Mamuju baik terkait Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Kemandirian serta Pelayanan Kesehatan kepada Warga Binaan Pemasarakatan.

A. Rencana tindak ke depan (periode Tahun Anggaran 2024)

Guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju khususnya dalam pencapaian kinerja ke depannya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi dengan Kantor Wilayah (Divisi Pemasarakatan), terkait pelaksanaan tugas pemasarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasarakatan.
3. Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas sehingga kinerja yang dihasilkan lebih baik dari sebelumnya.
4. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berkala baik terhadap pelaksanaan kegiatan layanan, Pembinaan serta penggunaan anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju sebagai bahan pertanggung jawaban dan evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2023.

Koreksi serta saran terhadap laporan ini sangat kami harapkan untuk menjadi bahan kami dalam Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang agar kinerja kami selanjutnya menjadi lebih baik lagi.

Mamuju, 04 Januari 2024

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Novian Endus Santoso

NIP. 19751107 199703 1001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAMUJU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novian Endus Santoso
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Parlindungan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 4 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Ham Sulawesi Barat

Parlindungan
NIP 197007011992031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Mamuju

Novian Endus Santoso
NIP 197511071997031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAMUJU DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekankan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

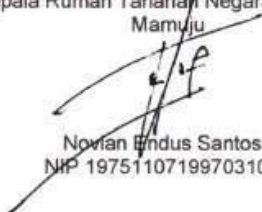
Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2,859,262,000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.859,262,000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4,111,228,000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4,111,228,000,-

Mamuju, 4 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Ham Sulawesi Barat


Parindungan
NIP 197007011992031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Mamuju


Novian Endus Santoso
NIP 197511071997031001

